



Meredam Polarisasi Politik di Era Jokowi: Pendekatan Diskursus Deliberatif Jürgen Habermas

Marselinus Langgor¹, Aldofus Leba², Felix Riondi Sugar^{3*}, Adelberto Wili Boko⁴, Ikordinus P. Wasini⁵, Fridolin Mawangsurri Fallo⁶, Yohanes Reinaldi Lagang⁷, Yohanes Prasesko Djegaut⁸

¹⁻⁸ Prodi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

*Penulis Korespondensi: felikssugar@gmail.com

Abstract. *This article examines the phenomenon of political polarization in Indonesia during President Joko Widodo's administration, which has been intensifying, particularly in the context of elections and social media dynamics. This polarization is characterized by the division of society into groups that are ideologically, politically, and socially opposed to one another, which in turn threatens social cohesion and democratic stability. This study employs a qualitative method with a literature review approach to analyze the dynamics of political polarization and offers normative solutions through Jürgen Habermas's theory of deliberative discourse. The findings indicate that political polarization in Indonesia is influenced by intense electoral contests, the politicization of identity, and the spread of disinformation in the digital sphere. In this context, Habermas's theory of deliberative democracy offers an alternative approach by emphasizing the importance of an inclusive public sphere, rational dialogue, and citizen participation in the policy-making process. This approach focuses not only on political outcomes but also on fair and reflective communication procedures to achieve consensus. This article concludes that strengthening the deliberative public sphere, political education, digital literacy, and the ethics of public communication can serve as effective strategies to mitigate political polarization in Indonesia.*

Keywords: *Deliberative Democracy; Discourse; Jürgen Habermas; Political Polarization; Public Sphere.*

Abstrak. Artikel ini membahas fenomena polarisasi politik di Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang semakin menguat, terutama dalam konteks pemilu dan dinamika media sosial. Polarisasi tersebut ditandai oleh keterbelahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berlawanan secara ideologis, politik, dan sosial, yang pada gilirannya mengancam kohesi sosial serta stabilitas demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis dinamika polarisasi politik serta menawarkan solusi normatif melalui teori diskursus deliberatif Jürgen Habermas. Hasil kajian menunjukkan bahwa polarisasi politik di Indonesia dipengaruhi oleh kontestasi elektoral yang intens, politisasi identitas, serta penyebaran disinformasi di ruang digital. Dalam konteks ini, teori demokrasi deliberatif Habermas menawarkan pendekatan alternatif dengan menekankan pentingnya ruang publik yang inklusif, dialog rasional, dan partisipasi warga negara dalam proses pembentukan kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil politik, tetapi pada prosedur komunikasi yang adil dan reflektif untuk mencapai konsensus. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan ruang publik deliberatif, pendidikan politik, literasi digital, serta etika komunikasi publik dapat menjadi strategi efektif dalam meredam polarisasi politik di Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi Deliberatif ; Diskursus; Jürgen Habermas; Polarisasi Politik; Ruang Publik.

1. LATAR BELAKANG

Belakangan ini, nama Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik, baik melalui polemik dugaan ijazah palsu maupun pernyataan Jusuf Kalla beserta berbagai respons yang muncul di media sosial. Meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai presiden, pengaruh dan reputasi politiknya masih tetap kuat, bahkan masih terasa dalam dinamika politik nasional. Jika ditinjau lebih jauh, situasi ini dapat diibaratkan seperti permainan catur yang masih terus berlangsung, di mana perannya tetap signifikan meskipun ia tidak lagi menduduki kursi kepresidenan.

Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari fenomena polarisasi sosial yang menjadi salah satu ciri menonjol dalam sistem demokrasi Indonesia, terutama dalam satu dekade terakhir pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Polarisasi ini ditandai oleh semakin tajamnya perpecahan dalam masyarakat, baik dalam konteks politik, etnis, maupun agama. Memasuki awal pemilu 2024, kekhawatiran terhadap polarisasi kembali menguat, karena pengalaman pada pemilu 2019 masih meninggalkan jejak yang cukup dalam dan diwaspadai agar tidak terulang kembali. Pada pemilu 2019, keterbelahan politik berbasis identitas, khususnya agama, sangat terlihat di ruang publik. Masyarakat terbelah ke dalam dua kubu besar, yakni pendukung Prabowo Subianto dan pendukung Joko Widodo, yang masing-masing sering dikaitkan dengan latar belakang ideologis dan keagamaan tertentu (Edna, 2024). Kubu Prabowo kerap diasosiasikan dengan kelompok Islamis, sementara kubu Jokowi lebih sering dikaitkan dengan kelompok pluralis yang mapan dan berstrategi.

Dalam situasi tersebut, masing-masing pihak saling melontarkan narasi yang cenderung menyerang lawan politiknya. Kelompok pendukung Prabowo, misalnya, menilai Jokowi sebagai pemimpin yang dianggap tidak memiliki kedekatan yang kuat dengan nilai-nilai Islam serta dicurigai akan menerapkan kebijakan yang kurang berpihak pada umat Muslim. Sebaliknya, kelompok pendukung Jokowi menganggap Prabowo sebagai kandidat yang ditunggangi oleh kelompok ekstremis agama dan memiliki potensi untuk mengubah arah negara menuju sistem berbasis agama tertentu seperti kekhalifahan (Mansyur, 2023). Pertentangan narasi ini memperlihatkan bagaimana identitas agama menjadi salah satu sumber utama polarisasi dalam kontestasi politik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa polarisasi politik di Indonesia bukanlah gejala baru, melainkan telah berkembang sejak Pemilu 2014 dan semakin menguat pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam konteks ini, dinamika politik yang melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Joko Widodo tidak hanya terbatas pada masa jabatannya, tetapi juga terus berpengaruh dalam membentuk opini publik dan polarisasi sosial yang masih terasa hingga saat ini.

Adalah bahwa pemicu polarisasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti meningkatnya ketidakpuasan terhadap pemerintahan dan penyebaran informasi yang tidak akurat di media sosial. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani isu-isu seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan berpotensi meningkatkan ketegangan antara pendukung dan penentang pemerintah. Misalnya, selama pemilu, banyak berita palsu beredar yang memperburuk ketegangan di antara pendukung masing-masing calon dan menciptakan prasangka negatif. Ketidakpuasan dan informasi yang salah ini seringkali memperkuat identitas kelompok, membuat perdebatan publik semakin terpolarisasi. Selain itu, di era kepemimpinan

Presiden Prabowo isu politik Jokowi dikaitkan dengan mengkeritik segala kebijakan kabinet Prabowo dengan menyebarkan isu-isu miring. Hal ini menunjukkan bahwa peta politik Jowi masih terus berlanjut dan memasuki babak baru.

Dengan itu adalah bahwa setiap warga negara dalam sebuah negara demokrasi memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi di ruang publik, menyampaikan pendapat dan memberi dukungan terhadap partai politik tertentu. Pendapat dan dukungan yang berbeda cenderung menciptakan polarisasi politik yang tinggi dan berpotensi kepada perpecahan. Di satu sisi polarisasi ini sangat positif dalam membentuk keputusan pemerintahan. Namun, hal yang ditakutkan ialah polarisasi ekstrim, polarisasi ini dapat merusak kohesi sosial dan membahayakan demokrasi di Indonesia, yang pada akhirnya menciptakan ketegangan antarkelompok. Situasi terpolarisasi memberi dampak seperti terancamnya stabilitas dan fungsi demokrasi, serta terjadinya konflik terbuka karena kedua kelompok sulit untuk berkomunikasi dan bernegosiasi. Dampak ini menyebabkan masalah yang serius terhadap negara untuk mengambil konsensus sosial dan kebijakan-kebijakan pemerintahan mati suri dalam penerapannya. Oleh sebab itu perlu adanya cara untuk meredam polarisasi yang ekstrim agar bisa menciptakan mutu demokrasi yang adil, tentram dan harmonis.

Penulis dalam hal ini menawarkan pendekatan diskursus deliberatif yang dicanangkan oleh Jürgen Habermas untuk membuka ruang publik yang memungkinkan dialog terbuka dan rasional antarindividu dan antarkelompok dengan pandangan dan kepentingan yang berbeda. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi polarisasi dengan memfasilitasi komunikasi yang konstruktif dan memperkuat demokrasi deliberatif, di mana keputusan diambil berdasarkan konsensus daripada dominasi suara mayoritas (Held, 2006). Lewar & Madung (2023) menegaskan bahwa dalam demokrasi deliberatif Habermas, legitimasi politik yang ideal diperoleh melalui proses komunikasi rasional yang melibatkan partisipasi seluruh warga negara dan berbagai kelompok masyarakat. Dalam pandangan ini, Habermas menekankan bahwa keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh dukungan mayoritas, tetapi merupakan hasil dari dialog dan diskursus yang rasional, inklusif, serta reflektif di antara warga negara. Seperti halnya Lewar & Madung, Gimmler (2001) menerangkan bahwa negara yang menganut demokrasi deliberatif, proses pembentukan hukum dan kebijakan politik tidak lagi dilakukan secara tertutup oleh negara, melainkan melibatkan kontribusi aktif warga negara. Dengan itu masyarakat ikut berpartisipasi dalam perumusan berbagai kebijakan politik dan hukum, baik melalui media maupun melalui berbagai organisasi. Dalam konteks ini, ruang publik berfungsi sebagai arena diskursif tempat proses penyusunan dan pengarahannya kebijakan serta perundang-undangan berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Sejalan dengan ini Gastil (2008)

menegaskan bahwa teori demokrasi deliberatif tidak berfokus pada penyusunan seperangkat aturan yang secara rinci menentukan tindakan warga negara, melainkan lebih menekankan pada prosedur atau mekanisme yang digunakan untuk menghasilkan aturan-aturan tersebut.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji fenomena polarisasi di Indonesia dari beragam perspektif. Salah satunya Albana et al., (2025) menemukan bahwa politik identitas kerap digunakan sebagai instrumen diskriminasi terhadap kelompok minoritas, memperkuat polarisasi berbasis agama yang meluas hingga ruang digital, serta menguatnya stereotip etnis dan ras dalam dinamika politik. Sementara itu, Budiman & Jember (2021) menyoroti bahwa populisme menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat terjadinya polarisasi sosial, terutama melalui strategi politik seperti mobilisasi massa, penyebaran ujaran kebencian, dan eksploitasi keresahan publik pada masa pemilu. Di sisi lain, Mansyur, (2023) menunjukkan bahwa polarisasi antara kelompok Islamis dan pluralis pada periode 2014–2019 banyak dipengaruhi oleh strategi aktor politik dalam memobilisasi dukungan elektoral melalui narasi yang memecah belah masyarakat. Selain itu, penelitian dari Jemadin et al., (2026) dalam perspektif Habermas menegaskan bahwa polarisasi digital, fenomena *echo chamber*, disinformasi, serta ketimpangan kuasa digital telah melemahkan rasionalitas komunikatif dalam demokrasi deliberatif.

Meskipun berbagai kajian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor polarisasi di Indonesia, terdapat *research gap* yang masih belum banyak dieksplorasi secara mendalam, yaitu integrasi antara analisis penyebab polarisasi kontemporer dengan tawaran solusi normatif berbasis teori diskursus deliberatif Habermas secara aplikatif dalam konteks Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif-analitis dalam menjelaskan penyebab polarisasi atau normatif dalam menawarkan gagasan deliberatif, namun belum secara sistematis menghubungkan keduanya dalam satu kerangka analisis yang utuh. Berdasarkan gap tersebut, kebaruan (*novelty*) dari artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis empiris mengenai penyebab dan dampak polarisasi politik di Indonesia dengan pendekatan normatif teori diskursus deliberatif Habermas sebagai kerangka solusi. Artikel ini tidak hanya menguraikan faktor-faktor yang memicu polarisasi, tetapi juga menawarkan strategi konkret berbasis prinsip deliberatif seperti penguatan ruang publik inklusif, dialog rasional, literasi digital, serta etika komunikasi politik sebagai upaya mereduksi polarisasi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian polarisasi politik yang tidak hanya diagnostik, tetapi juga solutif dan aplikatif dalam konteks demokrasi Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode penelitian kualitatif dengan mengkaji tulisan-tulisan terdahulu mengenai tema yang sama dan membaca literatur-literatur yang mempunyai kaitan dengan tulisan ini. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali dan mendalami untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan (Iskandar, 2009). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena polarisasi politik di Indonesia secara mendalam, khususnya dalam konteks era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, serta menawarkan solusi normatif melalui teori diskursus deliberatif Jürgen Habermas. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta sumber-sumber terpercaya dari scopus, google scholar, sinta, garuda dan proquest yang relevan dengan tema polarisasi politik dan teori demokrasi deliberatif. Literatur tersebut digunakan untuk mengkaji konsep, dinamika, serta dampak polarisasi politik di Indonesia, sekaligus menguraikan gagasan Habermas mengenai diskursus deliberatif sebagai kerangka analisis dan solusi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, membaca, dan mengkaji secara sistematis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (1) reduksi data, yakni memilih dan memfokuskan data yang sesuai dengan tema polarisasi politik dan teori Habermas; (2) penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian yang berkaitan dengan penyebab polarisasi politik serta relevansi pendekatan diskursus deliberatif dalam meredamnya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena polarisasi politik di Indonesia serta menawarkan solusi teoretis yang aplikatif melalui pendekatan demokrasi deliberatif Habermas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Polarisasi Politik di Indonesia

Kata Polarisasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, perbuatan, magnetisasi, pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan (Indonesia, 2019). Polarisasi politik merupakan fenomena yang

terjadi pada masyarakat karena perbedaan pandangan sehingga terbagi menjadi dua kelompok yang saling bertentangan secara ideologis, politik, dan sosial (Karim, 2019). Perpecahan ini sering kali terjadi karena adanya perbedaan pandangan, nilai, dan tujuan dari setiap kelompok politik. Perbedaan pandangan politik itu bisa terjadi karena pemahaman yang berbeda tentang pengelolaan pemerintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik kebijakan ekonomi, kebijakan sosial maupun isu-isu lain yang menjadi fokus perhatian dari setiap kelompok.

Berkanca dari penegasan di atas bahwa faktor pemicu lain dari polarisasi adalah adanya perbedaan pandangan tentang nilai-nilai yang dianut oleh setiap kelompok. Nilai-nilai yang dianut oleh setiap kelompok berbeda-beda seperti nilai-nilai moral, nilai agama, sosial, keadilan, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pemikiran dan tindakan dari kelompok-kelompok tersebut (Novianti, 2022). Polarisasi politik menimbulkan ketegangan, keterpecahan, dan kebuntuan dalam proses pengambilan keputusan politik serta dapat merusak hubungan antara individu dan kelompok (Maulana, 2018). Polarisasi politik merujuk pada proses pembelahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berlawanan, di mana individu cenderung mengidentifikasi diri dengan satu kelompok dan menolak atau merendahkan kelompok lain.

Polarisasi politik dapat dilihat sebagai penajaman perbedaan ideologis yang diiringi dengan meningkatnya ketegangan dan antagonisme antarkelompok. Dalam konteks ini, individu tidak hanya berbeda pendapat, tetapi juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pihak lain (McCoy & Tahmina, 2018). Senada dengan ini pada era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) diwarnai oleh berbagai faktor yang berkontribusi pada polarisasi politik. *Pertama*, adanya kontestasi politik yang intens dalam pemilu, terutama pada pemilu 2014 dan 2019, yang memperkuat perpecahan antarkelompok dalam ruang publik. Berdasarkan catatan ini menurut Arief Budiman (2019), persaingan antara pendukung Jokowi dan Prabowo Subianto menciptakan garis pemisah yang jelas dalam masyarakat. *Kedua*, media sosial berperan besar dalam mempercepat penyebaran informasi yang cenderung memecah belah, di mana narasi negatif terhadap lawan politik sering kali lebih dominan. Terakhir, isu-isu sensitif seperti agama dan etnis semakin dieksploitasi oleh politikus untuk memperkuat basis dukungan, yang semakin memperparah polarisasi.

Hari-hari ini polarisasi politik memiliki dampak signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. *Pertama*, polarisasi dapat melemahkan partisipasi politik, di mana individu merasa terasing dari proses politik jika mereka tidak sejalan dengan mayoritas. Sejalan dengan penegasan ini menurut Siti Zuhro (2020) polarisasi menyebabkan apatisisme politik di kalangan sebagian warga negara yang membuat mager untuk ikut andil dalam dunia perpolitikan, karena

dianggap membosankan dan tidak menetap pada kebenaran. Keterpecahan dalam kelompok masyarakat menyebabkan sebagian masyarakat memilih untuk tidak menyibukan diri dengan urusan politik. Hal ini dapat menyebabkan degradasi partisipasi masyarakat dalam politik. Perselisihan dan perbedaan di antara kelompok menciptakan kefanatikan terhadap pendukung tertentu. Fanatik terhadap pendukung di antara kelompok dapat menyebabkan pemilu yang kurang kondusif, saling fitnah, dan adanya ancaman dari salah satu pihak. Di antara kelompok tidak lagi tercipta pemilu yang damai tetapi tercipta pemilu yang panas, saling mengujar kebencian, fitnah dan bahkan sampai pada tindakan kekerasan fisik atau pun mengancam kehilangan nyawa.

Kedua, polarisasi berpotensi mengancam stabilitas sosial, karena ketegangan antara kelompok dapat mengarah pada konflik terbuka dan kekerasan. Perpecahan dan perbedaan pandangan di antar kelompok dapat menimbulkan masalah sosial karena di antara kelompok saling mengujar kebencian, fitnah, dan menimbulkan suasana panas dan bahkan menimbulkan kekerasan fisik hingga mengancam kehilangan nyawa. Polarisasi politik menimbulkan ketegangan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat karena unsur kepentingan dan kefanatikan terhadap masing-masing ideologi dan pandangan masing masing kelompok. Polarisasi juga dapat mengurangi kredibilitas masyarakat. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik dan partai politik dukungan terhadap demokrasi menurun dan semakin sulit bagi masyarakat untuk bertindak berdasarkan prinsip moral dan nilai-nilai kebenaran ketika hal itu berhadapan dengan partai politik (McCoy, 2018).

Ketiga, polarisasi dapat menghambat proses deliberatif yang sehat, sehingga mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan publik. Perbedaan pandangan dan perpecahan di antar kelompok masyarakat menghambat proses deliberatif yang sehat. Ruang publik yang menjadi wacana untuk berdeliberasi justru menjadi sumber pemicu karena tiap kelompok saling menyerang melalui berita bohong dan saling menyerang satu sama lain (Erfain, 2025). Media diperalat oleh masing-masing kelompok sesuai dengan pandangan dan ideologi masing-masing kelompok tersebut. Berita bohong menghancurkan demokrasi dengan cara merusak formasi opini publik akibatnya masyarakat kehilangan rasa kepercayaan terhadap opini publik dan proses demokrasi.

Teori Diskursus Deliberatif Habermas

Jurgen Habermas (Habermas) merupakan filsuf generasi kedua Mazhab Frankfurt. (*Frankfurt School*) Jerman atau yang biasa dikenal dengan tradisi teori kritis. Sebagai penerus dari teori kritis, Habermas sangat produktif dalam melahirkan gagasan-gagasan yang ia temukan dari diskusi bersama para pendahulunya yakni Theodor Adorno dan Max Horkheimer.

Salah satu gagasan Habermas akan diulas dalam artikel ini ialah tentang diskursus deliberatif yang Ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul “*Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und der Demokratie*” atau dalam bahasa Inggrisnya “*Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*”

“*Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*” (Between Facts and Norms) adalah salah satu karya seminal Habermas yang diterbitkan pada tahun 1992. Dalam buku ini, Habermas mengembangkan pemikiran tentang ruang publik di dalam masyarakat majemuk dalam teori tindakan komunikatif dan etika diskursus (Hardiman, 2021). Dalam *Between Facts and Norms* Habermas menekankan politik deliberatif sebagai pendekatan penting dalam memahami demokrasi. Ia berargumen bahwa demokrasi seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek pemilihan umum, tetapi juga melibatkan proses komunikasi yang mencakup dialog dan debat antara warga negara. Habermas menekankan pentingnya ruang publik sebagai arena di mana individu dapat berkumpul untuk berdiskusi. Ruang ini harus terbuka bagi semua orang, sehingga setiap suara dapat didengar dan setiap individu dapat berpartisipasi dalam proses deliberasi secara setara. Argumentasi menjadi elemen kunci dalam proses ini, di mana kualitas diskusi sangat bergantung pada kemampuan peserta untuk menyampaikan argumen yang rasional dan relevan, serta mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan orang lain (Habermas, 1996).

Habermas juga menjelaskan hubungan antara fakta empiris dan norma-norma moral dalam pengambilan keputusan. Ia berpendapat bahwa keputusan yang sah dan legitim harus mempertimbangkan realitas sosial serta aspirasi moral masyarakat. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya realistis, tetapi juga beretika (Habermas, 1996) Keterlibatan aktif warga dalam proses deliberatif sangat penting, karena partisipasi tidak hanya memperkaya diskusi tetapi juga meningkatkan legitimasi dan kualitas keputusan yang diambil. Ketika warga merasa suaranya didengar, mereka akan lebih cenderung menerima hasil dari proses tersebut. Masyarakat sipil berperan sebagai jembatan dalam politik deliberatif, dengan organisasi-organisasi yang dapat mengorganisir forum publik dan mengadvokasi isu-isu penting, memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan. Habermas memberikan contoh tentang bagaimana forum publik dan kelompok diskusi dapat menciptakan ruang untuk deliberasi yang produktif, di mana berbagai pandangan dapat dipertimbangkan secara serius. Untuk mencapai politik deliberatif yang efektif, masyarakat perlu mengembangkan budaya yang menghargai dialog terbuka dan menghormati perbedaan pendapat.

Istilah deliberasi berasal dari kata latin *deliberatio* dalam bahasa Inggris menjadi *deliberation* yang berarti “konsultasi”, “menimbang-nimbang” atau dalam kosakata politik disebut “musyawarah”. Deliberatif berarti suatu bentuk komunikasi di mana individu berdialog dengan tujuan untuk mencapai pemahaman dan consensus (Budi Hardiman, 2021). Dalam proses dialog peserta berpartisipasi secara rasional untuk mengevaluasi argumen dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Partisipasi peserta yang bersifat dialogis dan sintesis sangat ditekankan dalam diskursus deliberatif, karena dalam kebersamaan yang dialogis upaya untuk mencari kebenaran yang berakar pada fakta, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat umum dapat terwujud (Dault, 2012).

Teori diskursus deliberatif Habermas masih relevan dalam konteks Indonesia, terutama dalam menghadapi polarisasi politik yang kian meningkat dewasa ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip deliberatif, masyarakat Indonesia dapat menciptakan ruang publik yang lebih inklusif, di mana berbagai kelompok, termasuk yang memiliki pandangan berbeda, dapat terlibat dalam dialog yang konstruktif. Penerapan diskursus deliberatif dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan memfasilitasi proses demokrasi yang lebih sehat. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk mengadopsi pendekatan yang memungkinkan diskusi yang mendalam dan berbasis pada argumen rasional, sehingga mampu meredakan konflik yang muncul akibat perbedaan pandangan. Relevansi diskursus deliberatif juga dapat dilihat dalam cara media berperan sebagai fasilitator ruang publik. Media memiliki potensi untuk membentuk opini publik dan menyediakan platform bagi dialog yang produktif. Dalam situasi di mana informasi sering kali terdistorsi, pendekatan diskursus deliberatif dapat membantu menciptakan suasana yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Media yang mengedepankan prinsip deliberatif dapat membantu mengurangi polarisasi dengan menampilkan beragam perspektif secara seimbang, serta memberikan ruang bagi narasi yang konstruktif dan solutif (Dahlgren, 2006).

Strategi Meredam Polarisasi Politik di Indonesia melalui Diskursus Deliberatif

Berhadapan dengan fakta polarisasi politik yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir, secara khusus pada masa kepemimpinan Jokowi, perlu adanya kesadaran untuk meminimalisir fakta polarisasi politik yang terjadi secara ekstrim agar stabilitas dan fungsi demokrasi dapat tercapai. Diskursus deliberatif, seperti yang diusulkan oleh Jürgen Habermas, dapat menjadi strategi yang efektif untuk meredam polarisasi politik. Pendekatan diskursus deliberatif berfokus pada pentingnya dialog terbuka dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, yang dapat membantu membangun pemahaman dan konsensus di antara berbagai kelompok masyarakat. Beberapa strategi dapat dibuat dalam beberapa hal berikut:

Membangun Ruang Publik yang Inklusif

Ruang publik yang inklusif merupakan fondasi penting dalam diskursus deliberatif di Indonesia. Keterlibatan aktif semua elemen masyarakat dalam dialog terbuka menjadi kunci untuk meredakan polarisasi dan mendorong ke arah harmoni sosial yang lebih baik. Dalam konteks polarisasi politik yang semakin meningkat, suara-suara dari kelompok yang sering terpinggirkan sering kali tidak didengar, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem. Hal ini menunjukkan perlunya sebuah forum di mana semua suara dapat disampaikan tanpa rasa takut akan stigma atau penolakan.

Untuk menciptakan ruang publik yang inklusif, dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Diskusi terbuka yang melibatkan beragam komunitas tidak hanya membantu mengidentifikasi masalah yang dihadapi kelompok-kelompok terpinggirkan, tetapi juga menciptakan jembatan antara berbagai kelompok yang mungkin memiliki pandangan berbeda. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam forum dialog dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan mencerminkan kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Dengan mempertemukan pemimpin komunitas, akademisi, dan warga biasa dalam dialog yang konstruktif, dapat membangun pemahaman yang lebih baik dan menciptakan solusi yang lebih holistik terhadap permasalahan yang ada. Selain itu, keterlibatan aktif generasi muda dalam diskusi juga sangat penting, karena generasi muda adalah masa depan bangsa dan memiliki perspektif yang segar. Melalui pendekatan yang inklusif tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial yang menjadi landasan bagi masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Mengedukasi Masyarakat tentang Proses Deliberatif

Pendidikan merupakan elemen penting dalam mempromosikan diskursus deliberatif. Program pendidikan yang menekankan keterampilan berargumentasi dan mendengarkan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya dialog. Misalnya, pelatihan tentang cara berpartisipasi dalam diskusi publik dan forum debat dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat (M, 2021). Latihan dalam diskusi dan forum debat dapat membantu mengurangi polarisasi di Indonesia dengan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang sudut pandang yang berbeda. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, individu akan lebih cenderung untuk terlibat dalam percakapan yang produktif, alih-alih terjebak dalam siklus ketidakpercayaan dan antagonisme.

Selain itu, pendidikan yang fokus pada deliberasi dapat memperkuat kemampuan individu dalam berpikir kritis dan berargumentasi dengan baik. Ketika masyarakat diberikan

pelatihan dalam berpikir analitis dan mendengarkan dengan empati, mereka akan lebih mampu untuk mengevaluasi informasi dan argumen secara objektif. Hal ini sangat penting di era informasi yang cepat dan seringkali membingungkan, di mana masyarakat perlu dapat membedakan antara fakta dan opini. Dengan meningkatkan kemampuan ini, masyarakat dapat lebih baik dalam berkontribusi dalam diskusi publik dan membuat keputusan yang lebih informasional.

Menggunakan Teknologi untuk Memfasilitasi Dialog

Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong diskursus deliberatif, terutama melalui media sosial dan platform *online*. Pemerintah dapat memanfaatkan aplikasi atau situs web untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai kebijakan publik, yang memungkinkan partisipasi lebih luas, termasuk bagi mereka yang tidak dapat hadir secara fisik. Selain itu, akses yang lebih baik terhadap informasi dapat meningkatkan kualitas deliberasi dan mengurangi ketegangan antar kelompok, memungkinkan individu untuk berpartisipasi dengan lebih aktif (Gudowsky, 2013).

Lebih jauh, keberagaman alat dan platform digital memberikan masyarakat pilihan saluran komunikasi yang sesuai dengan preferensinya. Dengan fitur moderasi yang ada, forum *online* dapat menciptakan suasana yang mendukung dialog konstruktif dan mengurangi potensi konflik. Keberagaman ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan, tetapi juga memperkaya diskusi dengan perspektif yang lebih beragam. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam dialog publik dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi polarisasi di masyarakat.

Mendorong Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk mencapai hasil yang legitim. Dalam konteks Indonesia, pemerintah perlu melibatkan berbagai kelompok, termasuk partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, dalam dialog publik. Melalui keterlibatan ini, kepentingan yang berbeda dapat dipertimbangkan, dan solusi yang lebih inklusif dapat ditemukan.

Setiap warga negara mempunyai peran penting dalam upaya mengurangi polarisasi, mulai dari menghilangkan prasangka pribadi hingga berpartisipasi dalam dialog konstruktif. Setiap elemen mulai dari pemimpin politik dan sosial, media, dan masyarakat sipil mempunyai tanggungjawab yang sama untuk meningkatkan toleransi, inklusivitas, dan partisipasi aktif dalam kehidupan publik. Setiap pemangku kepentingan ini sangat berperan penting dalam membangun dialog yang sehat dan terbuka serta saling mendengarkan satu sama lain. Dengan demikian ruang publik menjadi sarana untuk saling mengemukakan pendapat demi terwujudnya negara yang harmonis.

Keterlibatan dari pemangku kepentingan dalam kehidupan bernegara sangat penting untuk menciptakan keterbukaan wawasan dan pengetahuan serta menumbuhkan rasa keharmonisan melalui dialog satu sama lain. Dengan berdialog memungkinkan setiap persoalan menemukan titik terang dan jalan keluarnya. Berdialog juga membuka sekat-sekat serta batasan-batasan dalam kelompok dan memungkinkan terciptanya keterbukaan satu sama lain.

Menjaga Etika dalam Diskusi

Menjaga etika dalam diskusi publik adalah kunci untuk menciptakan suasana yang kondusif. Pendekatan deliberatif harus mengedepankan rasa saling menghormati dan terbuka terhadap perbedaan. Penggunaan bahasa yang inklusif dan menghindari serangan pribadi dapat menciptakan suasana yang positif untuk dialog yang konstruktif. Organisasi penyelenggara forum perlu menetapkan norma-norma etika yang jelas untuk memastikan diskusi berlangsung dengan baik.

Etika dalam diskusi merupakan hal yang penting karena mengatur tingkah laku individu dalam diskusi itu berlangsung. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Namun kebebasannya itu mesti diatur agar tidak menjadi suatu persoalan. Etika dalam diskusi merupakan kunci utama agar diskusi itu berjalan lancar. Dengan adanya etika setiap orang mempunyai tanggungjawab untuk saling menghargai, menghormati, dan mendengarkan pendapat satu sama lain dalam diskusi itu berlangsung. Sebagaimana yang ditekankan oleh Habermas bahwa dalam diskusi sangat penting untuk memperhatikan etika agar tercipta suatu diskusi yang kondusif dan saling menghargai satu sama lain. Keterbukaan dan saling menghargai memungkinkan orang untuk berpartisipasi aktif dalam berdiskusi.

Mengimplementasikan Kebijakan Berdasarkan Konsensus

Kebijakan yang dihasilkan dari proses deliberatif yang melibatkan berbagai kelompok akan lebih mungkin diterima oleh masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, legitimasi kebijakan akan meningkat. Kebijakan yang dianggap representatif akan mengurangi ketidakpuasan dan perpecahan yang sering muncul akibat kebijakan yang dianggap sepihak atau tidak mewakili kepentingan rakyat.

Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus memungkinkan untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas tinggi dengan melibatkan semua kelompok. Melibatkan semua kelompok dalam mengambil kebijakan membantu untuk meminimalisir kerugian dan demi terwujudnya kebijakan yang menguntungkan banyak orang. Kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan diskusi bersama akan mengurangi ketidakpuasan dan menjawab kepentingan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Polarisasi politik yang menguat di Indonesia pada era kepemimpinan Joko Widodo telah menimbulkan dampak serius terhadap kohesi sosial, kualitas demokrasi, serta efektivitas proses pengambilan keputusan publik. Keterbelahan masyarakat yang berbasis ideologi, agama, dan kepentingan politik menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam mengelola perbedaan di ruang publik. Dalam konteks ini, teori diskursus deliberatif Jürgen Habermas menawarkan kerangka normatif yang relevan untuk membangun kembali kualitas demokrasi melalui dialog yang rasional, inklusif, dan partisipatif.

Pendekatan deliberatif menekankan pentingnya ruang publik yang terbuka, keterlibatan aktif warga negara, serta pembentukan kebijakan berdasarkan konsensus, bukan dominasi mayoritas. Upaya meredam polarisasi dapat dilakukan melalui penguatan ruang publik yang inklusif, pendidikan politik yang deliberatif, pemanfaatan teknologi secara konstruktif, keterlibatan pemangku kepentingan, serta penegakan etika dalam diskusi publik. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme elektoral, tetapi juga sebagai proses komunikasi yang berkelanjutan. Akhirnya, penerapan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif di Indonesia diharapkan dapat memperkuat budaya dialog, mengurangi ketegangan sosial, serta membangun konsensus politik yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam kehidupan demokrasi.

DAFTAR REFERENSI

- Albana, M., Tinggi, S., Sosial, I., & Trimasda, P. (2025). Politik identitas dan polarisasi demokrasi di Indonesia: Ancaman terhadap keutuhan sosial dalam negara plural. *Journal Evidence of Law*, 4(2), 638–645.
- Budiman, B. N., & Jember, U. (2021). Populisme di Indonesia sebagai ancaman polarisasi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(02), 235–246.
- Dahlgren, P. (2006). The internet, public spheres, and political communication: Dispersion and deliberation. *Political Communication*, 22(2), 151.
- Dault, A. (2012). *Menghadang negara gagal, sebuah ijihad politik*. Renebook.
- Edna, C. (2024). Polarisasi yang didorong sentimen agama berpotensi terulang di Pemilu 2024. *Kompas*. Diakses dari https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/19/polarisasi-masyarakat-berdasarkan-agama-berpotensi-terjadi-lagi-pemilu-2024?open_from=search_result_page, diakses pada 15 Oktober 2024.
- Erfain. (2025). Resiliensi civil society di tengah polarisasi sosial-politik dalam perspektif demokrasi deliberatif. *Journal of Humanities, Social Sciences, And Education (JHUSE)*, 1(1), 103–115.

- Hardiman, F. B. (2021). *Demokrasi deliberatif: Menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori Jürgen Habermas*. Kanisius.
- Gastil, J. (2008). Public deliberation as the organizing principle of political communication research. *Journal of Public Deliberation*.
- Gimmler, A. (2001). Deliberative democracy, the public sphere, and the internet. *Philosophy & Social Criticism*, 27(4), 21–39.
- Gudowsky, U. B., & N. (2013). The role of information in public participation. *Journal of Public Deliberation*, 9(1), 7.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. The MIT Press.
- Held, D. (2006). *Models of democracy*. Stanford University Press.
- Indonesia, D. P. N. R. (2019). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Iskandar. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Gaung Persada.
- Jemadin, S., Tahamin, A., & Publik, R. (2026). Demokrasi deliberatif Habermas dan problematika ideologi di ruang publik digital. *Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, Dan Budaya*, 9(1), 15–27.
- McCoy, J., Rahman, T., & M. S. (2018). Polarization and the global crisis of democracy: Common patterns, dynamics, and pernicious consequences for democratic polities. *American Behavioral Scientist*, 62(1), 25.
- Karim, A. G. (2019). Mengelola polarisasi politik dalam sirkulasi kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi agenda riset. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 219.
- Lewar, P. P. (2023). Demokrasi sebagai diskursus dan deliberasi menurut Jürgen Habermas. *Jurnal Ledalero*, 21(2).
- M, A. (2021). Pendidikan deliberatif: Membangun dialog publik yang konstruktif. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 62, 129–136.
- Mansyur, I. C. (2023). Polarisasi politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah kajian pustaka. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1>
- Maulana, A. (2018). *Polarisasi politik aliran di era reformasi*. Caremedia Communication.
- McCoy, M. S., & J. (2018). Déjà vu? Polarization and endangered democracies in the 21st century. *American Behavioral Scientist*, 62(1), 8.
- Novianti, A. B. (2022). Praktek etnisitas dalam politik identitas di tengah multikulturalisme bangsa Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 221.